

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH MELALUI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI GUNA MENCAPAI *GOOD GOVERNANCE* DI KOTA PALANGKARAYA

Kristina Yumanthia
NPP. 29.1981

*Asdaf Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Keuangan Publik*

Email: kristinayumanthia771@gmail.com

ABSTRACT

Problem (GAP): The author focuses on the problem of the non-optimal implementation of non-cash transactions as a whole in the implementation of regional budgets. **Purpose:** The purpose of this study was to determine how much effectiveness the implementation of the regional budget through non-cash transactions was. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Researchers use descriptive qualitative research methods with an inductive approach so that researchers can analyze and describe the research phenomenon of researchers completely and coherently based on the facts obtained so that researchers can draw meaningful research conclusions. In this study, researchers collect data by conducting interviews (interviews), observations (observation), and documentation (taking notes). While the data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing. **Results/Findings:** The results of the author's research show that it has been carried out effectively in accordance with the guidelines. Inhibiting factors include 1). Problems with laws and regulations and the limitations of the legal umbrella. 2). Infrastructure problems and other non-technical constraints. 3). Lack of human resources and ASN understanding of non-cash transactions. **Conclusion:** The procedure for implementing non-cash transactions in the implementation of the Palangkaraya City government budget at the Palangkaraya City BPKAD is considered effective and has been implemented in stages based on the circular letter of the Minister of Home Affairs regarding non-cash transactions.

Keywords: non-cash transactions, budget execution, regional spending, good governance

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penulis berfokus pada masalah belum optimalnya penerapan transaksi non tunai secara menyeluruh pada pelaksanaan anggaran daerah. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pelaksanaan anggaran daerah melalui transaksi non tunai. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa sudah dijalankan secara efektif sesuai dengan panduan. Faktor penghambat meliputi 1). Masalah peraturan perundang – undangan dan keterbatasan payung hukum. 2). Masalah infrastruktur dan kendala non teknis lainnya. 3). Minimnya sumber daya manusia dan pemahan ASN tentang transaksi non tunai. **Kesimpulan:** Prosedur penerpan stransaksi non tunai dalam pelaksanaan anggaran pemerintahan Koata Palangkaraya pada BPKAD Kota Palangkaraya dinilai sudah efektif dan telah diterapkan secara bertahap berdasarkan surat edaran Mendagri tentan transaksi non tunai.

Kata Kunci : Transaksi non tunai, pelaksanaan anggaran, belanja daerah, good governance

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan sistem transaksi non tunai, Pemerintah kota Palangkaraya bekerjasama dengan PT. Bank Kalteng selaku pihak bank yang memegang rekening kas umum daerah Pemerintah Kota palangkaraya telah menetapkan kerangka komitmen untuk meminimalisir tanda-tanda “penyimpangan” korupsi, kolusi dan nepotisme terkait pengelolaan keuangan daerah. Sosialisasi layanan cashless banking telah dilakukan dan rencana implementasi telah dilakukan. Dengan Transaksi non tunai yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah yang kompatibel secara hukum, transparan dan bertanggung jawab. Namun sayangnya, penerapan Transaksi Non Tunai di Kota Palangkaraya masih tergolong rendah setelah hampir empat tahun pelaksanaan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangkaraya melakukan sosialisasi SK Wali Kota Nomor 188.55/9/2017 kepada berbagai SOPD Pemkot. Selain sosialisasi, BKAD Kota Palangkaraya juga evaluasi kesiapan SDM Kota Palangkaraya untuk melakukan sistem transaksi non tunai guna membantu terwujudnya good governance bagi pemerintah Kota Palangkaraya.

Setelah dikeluarkannya Instruksi Walikota mengenai transaksi non tunai, pihak BPKAD telah menyampaikan kepada setiap SOPD yang ada di Kota Palangkaraya melalui sosialisai Layanan Perbankan Non Tunai dan Penyampaian Rencana pelaksanaan transaksi non tunai kepada 37 SOPD yang ada di pemerintahan Kota Palangkaraya. informasi yang disampaikan oleh BPKAD Kota palangkaraya telah diterima dengan baik oleh rekanan dan masyarakat. Beberapa dari masyarakat

ataupun rekanan yang menerima informasi itu tidak merasa keberatan terhadap kebijakan yang ada yang mengharuskan setiap transaksi yang dilakukan oleh SOPD dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, namun juga ada beberapa masyarakat yang belum siap dan belum mengerti tentang Transaksi non tunai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran daerah yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance yang transparan, bertanggung jawab, efektif, efisien dan berdasarkan kepada hukum. Dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai, BKAD Kota Palangkaraya memiliki beberapa keunggulan, namun juga memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI GUNA MENCAPAI GOOD GOVERNANCE DI KOTA PALANGKARAYA.”**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masalah yang ada berfokus pada belum optimalnya penerapan Mekanisme Transaksi Non Tunai di Kota Palangkaraya terhadap keseluruhan transaksi pelaksanaan anggaran belanja daerah. Padahal dengan openerapan yang baik maka pelaksanaan anggaran daerah akan berjalan lebih efektif.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pertama yaitu penelitian oleh Suluh Hendrawan , Nur Anisah, Lina Nasihatun Nafidah dengan judul Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Kedua penelitian oleh Santi Retno Astuti dengan judul Analisis implementasi transaksi non tunai (*non cash*) dalam mewujudkan good governance pada pemerintahan kota yogyakarta. Ketiga penelitian oleh Elsje Celvia Mongisidi, Rosalina A.M Koleangan, Debby. Ch. Rotinsulu dengan judul Analisis implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Manado.

Berdasarkan penelitian sebelumnya pada tabel diatas, secara garis besar objek penelitian yang diteliti adalah penggunaan sistem transaksi non tunai serta permasalahan yang diteliti adalah menyangkut penggunaan sistem transaksi non tunai itu dalam pelaksanaan anggaran daerah. Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa persamaan dan/atau perbedaan. Adapun persamaan yang terlihat jelas, yaitu sama-sama meneliti kegiatan transaksi dalam pelaksanaan anggaran daerah melalui sistem transaksi non tunai di daerah sesuai dengan lokus yang ditetapkan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih

luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di Kota Palangkaraya.

1.5. Tujuan.

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ini meliputi:

1. Untuk mengetahui mampu atau tidaknya sistem transaksi non tunai mewujudkan prinsip Good Governance dalam pelaksanaan anggaran daerah Kota Palangkaraya
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Transaksi Non Tunai di Kota Palangkaraya
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengefektivaskan penerapan sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan anggaran daerah di Kota Palangkaraya

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sugiyono, 2019. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Simangunsong, 2017.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Daerah Melalui Transaksi Non Tunai Guna Mencapai Good Governance Di Kota Palangkaraya

Peneliti menganalisis efektivitas dengan menggunakan teori dari Duncan, dimana dimensi pengukuran efektivitas meliputi pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi.

A. Pencapaian Tujuan, Penerapan Transaksi Non Tunai di Kota Palangkaraya telah dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Pemerintah Daerah yang ada di Kota Palangkaraya sesuai dengan Instruksi Walikota Palangkaraya Nomor 188.55/9/2017 tentang pelaksanaan transaksi Non Tunai di SOPD Pemerintahan Kota Palangkaraya. Pelaksanaan dari sisi Belanja Daerah mencakup berbagai macam aspek belanja yakni belanja rutin, belanja pembangunan, belanja layanan/subsidi publik, hingga pembayaran honorarium. Hasil dimensi ini diperinci menjadi 1. Transaksi Non Tunai lebih efektif dan lebih membantu dalam setiap transaksi pelaksanaan anggaran BPKAD kota

Palangkaraya, 2. pelaksanaan transaksi non tunai membuat semuanya lebih terarah dan laebih jelas kemana arah aliran transaksi uang itu dibuat 3. Lebih baik dari segi keamanan uang, bendahara tidak perlu lagikhawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebobolan brankas, uang tercecer, ataupun dirampok

- B. Integrasi,** menurut Moleong, Lexy J. 2013. Integrasi adalah proses menyatupadukan dan menyelaraskan tujuan dan kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan. Setelah dikeluarkannya Instruksi Walikota mengenai transaksi non tunai, pihak BPKAD telah menyampaikan kepada setiap SOPD yang ada di Kota Palangkaraya melalui sosialisai Layanan Perbankan Non Tunai dan Penyampaian Rencana pelaksanaan transaksi non tunai kepada 37 SOPD yang ada di pemerintahan Kota Palangkaraya. informasi yang disampaikan oleh BPKAD Kota palangkaraya telah diterima dengan baik oleh rekanan dan masyarakat. Beberapa dari masyarakat ataupun rekanan yang menerima informasi itu tidak merasa keberatan terhadap kebijakan yang ada yang mengharuskan setiap transaksi yang dilakukan oleh SOPD dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, namun juga ada beberapa masyarakat yang belum siap dan belum mengerti tentang Transaksi non tunai.
- C. Adaptasi,** Dengan adanya sistem Transaksi non tunai, bendahara merasa sangat terbantu karena mereka dapat melaksanakan transaksi selama 24 jam tanpa harus membawa uang kemana-mana dan rasa was-was mereka menjadi berkurang karena di brankas sudah tidak ada lagi uang tunai yang banyak serta tida harus membawa uang banyak kemana-mana saat melakukan kegiatan luar kantor. Tidak lama BPKAD Kota palangkaraya dalam menyesuaikan diri, pihak bendahara diberikan pengarahan singkat megenai bagaimana proses transaksi non tunanai dalam setiap pelaksanaan anggaran. Hal ini, membuat BPKAD selalu melakukan peningkatan SDM nya agar mampu mengikuti setiap perkembangan yang ada, terutama dalam hal transaksi non tunai ini.

Faktor penghambat meliputi 1). Masalah peraturan perundang – undangan dan keterbatasan payung hukum. 2). Masalah infrastruktur dan kendala non teknis lainnya. 3). Minimnya sumber daya manusia dan pemahan ASN tentang transaksi non tunai.

Upaya yang dilakukan meliputi 1). Pihak BPKAD Kota Palangkaraya akan melakukan pembiasaan penggunaan sistem Transaksi Non Tunai dengan *Cash Management System* (CMS) dalam setiap pelaksanaan anggaran dan belanja SOPD yang ada di Wilayah Kota Palangkaraya baik itu transaksi jumlah besar maupun jumlah kecil dengan batas pembayaran mulai dari 0 rupiah. Untuk mewujudkan hal ini, pihak BPKAD Kota Palangkaraya sedang gencar memberika sosialisasi kepada SOPD yang ada di Kota Palangkaraya, baik SOPD yang ada di wilayah pusat kota maupun SOPD yang ada di pinggiran kota. 2). Dalam hal infrastruktur, pihak BPKAD Kota Palangkaraya akan memastikan pengembangan infrastruktur secara bertahap agar mampu menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan mengenai Transaksi Non Tunai dalam setiap pelaksanaan anggaran daerah. Pihak BPKAD Kota Palangkaraya telah berkompromi dengan pihak bank daerah dalam peningkatan infrastruktur untuk menunjang pelaksanaan anggaran dengan sistem transaksi non tunai di wilayah

Kota Palangkaraya. 3). Terlaksananya transaksi non tunai tidak terlepas dari dukungan sumberdaya lainnya seperti anggaran, SDM, infrastruktur dan sistem informasi.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan penting yakni BPKAD selalu melakukan peningkatan SDM nya agar mampu mengikuti setiap perkembangan yang ada, terutama dalam hal transaksi non tunai ini. Hal tersebut relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suluh Hendrawan , Nur Anisah, Lina Nasihatun Nafidah, 2018 dengan judul Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang.

Selain itu penulis juga menemukan adanya relevansi yang membuktikan bahwa benar adanya Dengan Transaksi non tunai yang dilakukan maka dapat meningkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah yang kompatibel secara hukum, transparan dan bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi Retno Astuti, 2019 dengan judul Analisis implementasi transaksi non tunai (*non cash*) dalam mewujudkan good governance pada pemerintahan kota yogyakarta. Serta penelitian oleh Elsje Celvia Mongisidi, Rosalina A.M Koleangan, Debby. Ch. Rotinsulu, 2020 dengan judul Analisis implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Manado.

Temuan utama yang menunjukkan kebaharuan hasil penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu lainnya selain metode, informan dan lokus ialah penulis mendapati bahwa Dengan adanya sistem Transaksi non tunai, bendahara merasa sangat terbantu karena mereka dapat melaksanakan transaksi selama 24 jam tanpa harus membawa uang kemana-mana dan rasa was-was mereka menjadi berkurang karena di brankas sudah tidak ada lagi uang tunai yang banyak serta tida harus membawa uang banyak kemana-mana saat melakukan kegiatan luar kantor.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan pemn bahasan dari indikator yang dibahas didalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penerpan stransaksi non tunai dalam pelaksanaan anggaran pemerintahan Koata Palangkaraya pada BPKAD Kota Palangkaraya dinilai sudah efektif dan telah diterapkan secara bertahap berdasarkan surat edaran Mendagri tentan transaksi non tunai.
2. Faktor penghambat meliputi 1). Masalah peraturan perundang – undangan dan keterbatasan payung hukum. 2). Masalah infrastruktur dan kendala non teknis lainnya. 3). Minimnya sumber daya manusia dan pemahan ASN tentang transaksi non tunai.
3. Upaya yang dilakukan meliputi 1). Pihak BPKAD Kota Palangkaraya akan melakukan pembiasaan penggunaan sistem Transaksi Non Tunai dengan *Cash Management System* (CMS) dalam setiap pelaksanaan anggaran dan belanja SOPD yang ada di Wilayah Kota Palangkaraya

baik itu transaksi jumlah besar maupun jumlah kecil dengan batas pembayaran mulai dari 0 rupiah. Untuk mewujudkan hal ini, pihak BPKAD Kota Palangkaraya sedang gencar memberika sosialisasi kepada SOPD yang ada di Kota Palangkaraya, baik SOPD yang ada di wilayah pusat kota maupun SOPD yang ada di pinggiran kota. 2). Dalam hal infrastruktur, pihak BPKAD Kota Palangkaraya akan memastikan pengembangan infrastruktur secara bertahap agar mampu menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan mengenai Transaksi Non Tunai dalam setiap pelaksanaan anggaran daerah. Pihak BPKAD Kota Palangkaraya telah berkompromi dengan pihak bank daerah dalam peningkatan infrastruktur untuk menunjang pelaksanaan anggaran dengan sistem transaksi non tunai di wilayah Kota Palangkaraya. 3). Terlaksananya transaksi non tunai tidak terlepas dari dukungan sumberdaya lainnya seperti anggaran, SDM, infrastruktur dan sistem informasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menambah rekomendasi, mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan krusial baru muncul.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangkaraya serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, Grace, dkk. 2018. *Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung*. Jurnal Riset Akutansi Going Concern, 13(4) : 220-229.
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai, B. (2013). *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecapatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Journal Acta Diurna Komunikasi.
- Dian Kurnia, Lidanna. 2020. *Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro*. Lampung
- Elsje, Rosalina, dkk. 2019. *Analisis Implementasi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodelogi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta

Soleh, Chabib. 1999. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Citra

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*

